



Diplomasi Damai di Laut Tiongkok Selatan: Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Arbitrase dan Negosiasi

Volume 10 Issue 2
(September, 2024)
e-ISSN 2716-5191

Tahta Perjalanan¹

¹ Universitas Negeri Semarang (UNNES), Semarang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: December 7, 2023

Revised version received: September 30, 2024

Accepted: September 30, 2024

Available online: September 30, 2024

Keywords:

Arbitrase, Diplomatik, Negosiasi, Wilayah

How to Cite:

Tahta Perjalanan, 2024, "Diplomasi Damai di Laut Tiongkok Selatan: Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Arbitrase dan Negosiasi", Jurnal Hukum De'Rechtsstaat.

Corresponding Author:

Name: Tahta Perjalanan

Email: Tahtaperjalanan1001@students.unnes.ac.id



ABSTRAK

Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu konflik terpanas dalam politik regional, melibatkan sejumlah negara di kawasan Asia-Pasifik. Kompleksitas sengketa ini terakar dalam klaim wilayah yang saling tumpang tindih, persaingan untuk sumber daya alam yang kaya, dan ketegangan sejarah antar negara-negara yang terlibat. Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa internasional melalui diplomasi damai, dengan fokus studi pada Sengketa Laut Tiongkok Selatan. Kontroversi klaim wilayah dan sumber daya di kawasan tersebut mencapai puncaknya dengan pengadilan arbitrase, yang menghasilkan keputusan memihak Filipina. Artikel ini mengulas perkembangan diplomasi pasca-arbitrase antara Tiongkok dan Filipina, culminatif dalam kesepakatan bersama untuk membangun dan mengelola sumber daya di Laut Tiongkok Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengadilan arbitrase, respon pemerintah, dan dinamika negosiasi yang mendukung penyelesaian damai. Kesimpulan menyoroti implikasi global dan memberikan pembelajaran berharga untuk menangani sengketa internasional, menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi pilar utama dalam membangun dan memelihara hubungan antarnegara.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

The South China Sea dispute is one of the hottest conflicts in regional politics, involving a number of countries in the Asia-Pacific region. The complexity of this dispute is rooted in overlapping territorial claims, competition for rich natural resources, and historical tensions between the countries involved. This study aims to discuss the resolution of international disputes through peaceful diplomacy, with a case study focusing on the South China Sea Dispute. The controversy over territorial and resource claims in the region culminated in an arbitration court, which resulted in a decision in favor of the Philippines. However, the resolution of the dispute did not stop there; this article reviews the development of post-arbitration diplomacy between China and the Philippines, culminating in a joint agreement to develop and manage resources in the South China Sea. The results of the study show that the role of the arbitration court, government response, and negotiation dynamics support peaceful resolution. The conclusion highlights global implications and provides valuable lessons for dealing with international disputes, emphasizing that diplomacy remains a key pillar in building and maintaining relations between countries.

1. Pendahuluan

Sengketa Laut Tiongkok Selatan adalah salah satu konflik terpanas dalam politik regional, melibatkan sejumlah negara di kawasan Asia-Pasifik. Kompleksitas sengketa ini terakar dalam klaim wilayah yang saling tumpang tindih, persaingan untuk sumber daya alam yang kaya, dan ketegangan sejarah antar negara-negara yang terlibat. Dalam pengantar ini, kita akan menjelajahi berbagai dimensi yang membuat Sengketa Laut Tiongkok Selatan menjadi tantangan serius bagi stabilitas regional¹.

1. Klaim Wilayah yang Saling-silang

Ketidaksepakatan mengenai batas-batas wilayah di Laut Tiongkok Selatan menjadi salah satu aspek utama kompleksitas sengketa yang melibatkan beberapa negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Klaim-klaim yang saling tumpang tindih ini menciptakan dinamika yang rumit, dan para pihak seringkali menggantungkan argumen mereka pada sejarah, hukum laut internasional, serta pemahaman yang berbeda terkait garis batas maritim.

Salah satu faktor yang merumitkan sengketa ini adalah ketidakjelasan sejarah dan interpretasi berbeda terkait klaim wilayah. Negara-negara di kawasan seringkali mengacu pada sejarah kuno, seperti peta-peta klasik atau naskah-naskah sejarah, untuk mendukung klaim teritorial mereka. Namun, interpretasi sejarah ini dapat bervariasi, dan masing-masing negara memiliki narasi sendiri mengenai klaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan.

Hukum laut internasional menjadi landasan penting dalam perdebatan mengenai batas-batas wilayah di laut ini. Namun, implementasi dan interpretasi hukum ini sering kali menjadi sumber pertentangan. Perselisihan dapat muncul terkait dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yang mengatur hak-hak dan kewajiban negara-negara terkait perairan internasional. Negara-negara mungkin berbeda pendapat mengenai hak garis batas eksklusif, zona ekonomi eksklusif, dan hak suverenitas atas pulau-pulau kecil.

Garis batas maritim juga menjadi titik perdebatan yang hangat dalam sengketa ini. Negara-negara yang berpartisipasi dalam klaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan sering kali memiliki interpretasi yang berbeda mengenai bagaimana menetapkan garis batas yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Pemahaman ini mencakup masalah ketidaksetujuan terkait batas zona ekonomi eksklusif dan garis batas maritim yang menghubungkan pulau-pulau utama.

¹ Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics*. WW Norton & Company.

Peran sumber daya alam dalam sengketa ini menambah kompleksitasnya. Laut Tiongkok Selatan diperkirakan memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak dan gas. Oleh karena itu, klaim teritorial tidak hanya terkait dengan aspek politik dan strategis, tetapi juga berkaitan dengan kontrol atas potensi ekonomi yang signifikan. Persaingan untuk mengamankan akses dan hak eksploitasi sumber daya alam menjadi salah satu pendorong utama sengketa ini.

Tidak hanya itu, sengketa di Laut Tiongkok Selatan melibatkan dinamika geopolitik yang rumit. Keterlibatan negara-negara di luar kawasan, seperti Amerika Serikat, dapat memperumit situasi dan menambah dimensi internasional pada konflik tersebut. Kedudukan strategis Laut Tiongkok Selatan sebagai jalur pelayaran utama juga menimbulkan kekhawatiran keamanan dan mengaitkan sengketa ini dengan isu-isu keamanan regional dan global.

Penting untuk diakui bahwa penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan pendekatan yang holistik dan kerja sama yang erat antara semua pihak yang terlibat. Diplomasi yang terus-menerus, dialog konstruktif, dan keterbukaan untuk mencari solusi bersama menjadi kunci dalam mengatasi perbedaan pendapat yang kompleks ini. Dalam konteks sengketa wilayah ini, upaya untuk meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan harus terus dilakukan. Peran komunitas internasional dalam mendukung proses perdamaian dan memberikan platform untuk dialog yang terbuka menjadi sangat penting. Sementara itu, upaya untuk memahami dan menghormati hak-hak masing-masing negara juga merupakan langkah penting dalam merintis jalan menuju penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Negara-negara di kawasan seringkali memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait batas wilayah mereka, yang menciptakan sumber konflik yang konstan. Sebagai contoh, Tiongkok mendasarkan klaimnya pada peta sembilan garis putus-putus yang mencakup sebagian besar Laut Tiongkok Selatan, sementara negara-negara tetangganya mengklaim sebagian wilayah tersebut sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif mereka.

2. Persaingan Sumber Daya Alam

Laut Tiongkok Selatan dikenal karena kekayaan sumber daya alamnya, termasuk cadangan minyak dan gas, serta jalur perdagangan maritim yang strategis. Persaingan untuk mengendalikan dan mengakses sumber daya ini menjadi faktor pendorong utama sengketa ini. Negara-negara yang terlibat berusaha untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional mereka, menciptakan ketegangan yang sulit untuk diatasi.

Perusahaan dan negara-negara di kawasan sering kali bersaing untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang melimpah di wilayah ini. Ketidakjelasan batas-batas wilayah membuatnya sulit untuk menentukan hak dan tanggung jawab terkait sumber daya tersebut, memperumit sengketa dan meningkatkan intensitas persaingan.

3. Ketegangan Sejarah dan Keamanan

Ketegangan sejarah antara beberapa negara di kawasan turut menyulitkan penyelesaian sengketa ini. Beberapa sengketa berakar pada konflik historis, terutama terkait pendudukan pulau-pulau kecil atau klaim wilayah tertentu. Ingatan akan konflik masa lalu dan perbedaan pendapat mengenai interpretasi sejarah menciptakan hambatan tambahan dalam mencapai kesepakatan.

Dalam konteks keamanan, sengketa ini memicu peningkatan aktivitas militer di wilayah tersebut, termasuk pembangunan pangkalan militer, peningkatan armada, dan latihan militer. Hal ini menambah kompleksitas dinamika regional dan meningkatkan potensi eskalasi konflik.

Dengan memahami kompleksitas ini, kita dapat melihat bahwa penyelesaian sengketa ini tidak hanya memerlukan pertimbangan hukum dan diplomasi, tetapi juga upaya untuk mengatasi ketegangan sejarah dan membangun kepercayaan di antara negara-negara yang terlibat.

Penyelesaian damai dalam hubungan internasional memiliki signifikansi yang luar biasa karena tidak hanya menghindarkan negara-negara dari konsekuensi destruktif perang, tetapi juga memberikan landasan untuk kerjasama yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan masyarakat global yang lebih stabil dan adil. Artikel ini akan membahas pentingnya penyelesaian damai dalam konteks hubungan internasional dan dampak positifnya².

1. Mencegah Konflik Bersenjata

Penyelesaian damai mencegah terjadinya konflik bersenjata yang dapat merusak kehidupan dan keberlanjutan masyarakat. Perang tidak hanya menimbulkan kerugian manusia dan materi yang besar, tetapi juga meninggalkan trauma dan konsekuensi jangka panjang yang dapat mempengaruhi generasi mendatang. Dengan menyelesaikan perselisihan melalui diplomasi dan negosiasi, negara-negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih baik untuk pembangunan bersama.

2. Membangun Kerjasama Global

Penyelesaian damai membuka pintu bagi kerjasama global yang lebih erat. Negara-negara yang telah mengatasi perbedaan mereka melalui dialog dan kesepakatan cenderung bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, sains, dan teknologi. Kerjasama semacam itu memungkinkan pertukaran pengetahuan dan sumber daya yang saling menguntungkan, menghasilkan inovasi dan kemajuan yang lebih cepat.

3. Mempromosikan Pembangunan Ekonomi

Konflik bersenjata dapat merusak ekonomi negara-negara yang terlibat. Pemulihan setelah perang memerlukan sumber daya dan waktu yang signifikan. Dengan menyelesaikan sengketa secara damai, negara-negara dapat menghindari kerugian ekonomi yang besar dan fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dan perdagangan yang stabil dapat menghasilkan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Menciptakan Lingkungan Global yang Stabil

Penyelesaian damai berkontribusi pada menciptakan lingkungan global yang lebih stabil. Negara-negara yang memilih diplomasi daripada konflik cenderung mendukung sistem internasional yang didasarkan pada hukum dan norma-norma etika. Hal ini mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional, memberikan kepercayaan kepada aktor-aktor global untuk berpartisipasi dalam hubungan internasional dengan keyakinan bahwa perselisihan dapat diselesaikan melalui dialog.

5. Mendorong Pembangunan Masyarakat Global yang Adil

Penyelesaian damai mendorong pembangunan masyarakat global yang lebih adil. Dengan menekankan nilai-nilai seperti keadilan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan, negara-negara dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Penyelesaian damai memungkinkan negara-negara untuk bersatu dalam mencari solusi yang menguntungkan semua pihak³.

2 Brown, S. E., & Ainley, K. (Eds.). (2009). *Understanding International Relations*. Oxford University Press.

³ Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization. Peace by Peaceful Means*, 1-292.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk narasi yang menjelaskan tentang hasil penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

3. Hasil dan Pembahasan

Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan kompleksitas hubungan internasional yang melibatkan sejumlah negara di kawasan Asia-Pasifik. Klaim dan konflik antara negara-negara ini menciptakan ketegangan dan memicu perdebatan panjang terkait kedaulatan, sumber daya alam, dan jalur perdagangan maritim. Beberapa negara yang terlibat dalam sengketa ini meliputi Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Klaim wilayah yang saling tumpang tindih menjadi fokus utama konflik ini. Setiap negara memiliki interpretasi yang berbeda mengenai batas-batas laut mereka di Laut Tiongkok Selatan, dengan merujuk pada sejarah, hukum laut internasional, dan penafsiran yang berbeda-beda. Misalnya, Tiongkok mengklaim sebagian besar Laut Tiongkok Selatan berdasarkan peta sembilan garis putus-putus, sementara negara-negara tetangganya memiliki klaim teritorial yang bersaing⁴

Ketegangan semakin meningkat karena persaingan untuk menguasai sumber daya alam yang melimpah di kawasan tersebut. Laut Tiongkok Selatan dikenal karena cadangan minyak dan gasnya, dan persaingan untuk mengontrolnya telah menciptakan ketidakpastian dan sengketa ekonomi di antara negara-negara terlibat. Jalur perdagangan maritim yang strategis di kawasan ini juga menambah kompleksitas, dengan setiap negara berusaha melindungi kepentingan keamanan dan perdagangan mereka. Tantangan terkait keamanan regional dan ketegangan sejarah turut memperumit sengketa ini. Beberapa klaim dan konflik berakar pada sejarah penjajahan dan ketidaksepahaman terkait kepemilikan pulau-pulau kecil atau wilayah tertentu. Aktivitas militer yang meningkat, termasuk pembangunan pangkalan militer, turut menambah kompleksitas dinamika regional dan meningkatkan potensi eskalasi konflik.

Sengketa Laut Tiongkok Selatan mencerminkan dinamika kompleks yang melibatkan persaingan untuk sumber daya alam yang kaya dan kepentingan strategis antara negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Pada intinya, sumber daya alam, terutama minyak, gas, dan jalur perdagangan maritim, menjadi faktor utama yang memicu dan memperumit konflik ini.

3.1 Sumber Daya Alam sebagai Pemicu Sengketa:

Laut Tiongkok Selatan dikenal karena memiliki cadangan minyak dan gas yang melimpah di dasarnya. Negara-negara di kawasan ini bersaing untuk menguasai dan mengakses sumber daya alam ini karena mereka memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Cadangan energi ini menjadi daya tarik ekonomi dan keamanan yang besar bagi negara-negara yang berpartisipasi dalam sengketa ini. Kekayaan sumber daya alam juga mencakup ikan dan bahan tambang lainnya, yang menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat pesisir di wilayah tersebut. Oleh karena itu, klaim wilayah tidak hanya terkait dengan hak atas sumber daya, tetapi juga dengan hak untuk mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya.

3.2 Jalur Perdagangan Maritim dan Kepentingan Strategis:

⁴ Warka, M., Kleden, K. L., Afifah, W., Sugianto, F., Parihar, S. M., Faga, H. P., ... & Indrayati, I. R. *Mimbar Keadilan* Volume 16 Nomor 1 Februari 2023.

Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur perdagangan maritim yang sangat penting dan strategis. Lebih dari setengah perdagangan dunia melibatkan transportasi laut, dan jalur perdagangan di Laut Tiongkok Selatan menyediakan akses vital ke pasar global. Negara-negara di kawasan ini bersaing untuk mengontrol jalur pelayaran ini guna memastikan keamanan dan keberlanjutan aliran barang dan energi. Selain itu, kontrol atas jalur maritim ini memberikan kekuatan tawar yang signifikan dalam geopolitik global. Negara-negara yang dapat mengendalikan atau mempengaruhi arus perdagangan laut memiliki keuntungan strategis dalam hal keamanan nasional dan pengaruh regional. Oleh karena itu, sengketa ini tidak hanya mencerminkan persaingan ekonomi, tetapi juga kepentingan strategis yang kompleks⁵.

3.3 Peran Pengadilan Arbitrase Permanen

Keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen pada 12 Juli 2016, terkait klaim Filipina terhadap Tiongkok mengenai Sengketa Laut Tiongkok Selatan, menjadi sebuah tonggak sejarah yang memiliki implikasi luas dalam konteks hubungan internasional, hukum laut, dan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik. Dalam analisis keputusan tersebut, beberapa aspek muncul sebagai poin kunci yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Dasar Hukum; Keputusan arbitrase tersebut memfokuskan pada interpretasi dan penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pengadilan menyatakan bahwa klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok, yang mencakup sebagian besar Laut Tiongkok Selatan, tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS. Hal ini menciptakan kejelasan mengenai batas-batas wilayah laut yang diakui secara internasional.
2. Hak Eksplorasi dan Eksploitasi; Keputusan tersebut juga menyoroti pelanggaran yang dilakukan Tiongkok terhadap hak eksplorasi dan eksploitasi Filipina di zona ekonomi eksklusifnya. Aktivitas konstruksi Tiongkok di pulau-pulau tersembunyi di wilayah ini dianggap melanggar hak kedaulatan dan hak ekonomi Filipina. Hal ini memberikan legitimasi hukum bagi Filipina dan negara-negara lain yang menghadapi situasi serupa.
3. Implikasi Politik dan Geopolitik; Keputusan arbitrase ini menciptakan ketegangan politik dan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik. Meskipun Filipina mendapatkan dukungan internasional, Tiongkok menolak mengakui keputusan tersebut, menyatakan bahwa sengketa tersebut seharusnya diselesaikan secara bilateral. Sikap ini menciptakan ketidakpastian terkait pelaksanaan keputusan dan menunjukkan kompleksitas diplomasi dalam menangani sengketa tersebut.
4. Dampak Terhadap Dinamika Regional; Keputusan ini menciptakan dampak dalam dinamika keamanan dan stabilitas regional. Negara-negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan, seperti Vietnam dan Malaysia, juga melihat keputusan tersebut sebagai potensi panduan hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Di sisi lain, penolakan Tiongkok menciptakan tantangan terhadap upaya mencapai penyelesaian damai dan menghindari eskalasi konflik.

Keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen pada 12 Juli 2016, terkait klaim Filipina terhadap Tiongkok mengenai Sengketa Laut Tiongkok Selatan, menimbulkan reaksi awal yang beragam dan kontroversi di tingkat regional dan global. Keputusan tersebut menciptakan dampak yang signifikan dalam geopolitik regional dan dinamika hubungan

⁵ Wibowo, I., & Hadi, S. (2013). *Merangkul Cina*. Gramedia Pustaka Utama.

⁶ Cogliati-Bantz, V. P. (2016). The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China). *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 31(4), 759-774.

internasional, menimbulkan pertanyaan terkait pelaksanaan, kepatuhan, dan implikasi jangka panjang. Dalam analisis ini, penulis menguraikan reaksi awal dan kontroversi terkait putusan arbitrase tersebut, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Reaksi Filipina; Filipina merespons keputusan arbitrase tersebut dengan ekspresi kelegaan dan kemenangan. Keputusan ini dipandang sebagai pengakuan terhadap hak-hak Filipina dan menegaskan bahwa tindakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan melanggar hukum laut internasional. Pemerintah Filipina, di bawah Presiden Benigno Aquino III, menyatakan bahwa keputusan tersebut adalah langkah yang membawa keadilan dan perdamaian di kawasan tersebut.
2. Reaksi Tiongkok; Tiongkok, sebaliknya, menolak mengakui keputusan tersebut dan menyatakan bahwa itu tidak memiliki dampak atau kewajiban hukum apa pun. Pemerintah Tiongkok, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, menganggap sengketa tersebut sebagai isu bilateral yang seharusnya diselesaikan melalui negosiasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat tanpa campur tangan pihak ketiga. Pernyataan keras dan penolakan Tiongkok menciptakan ketegangan yang signifikan.
3. Reaksi Regional dan Global; Reaksi dari negara-negara regional dan global bersifat beragam. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan sejumlah negara Eropa menyambut baik keputusan tersebut, mendukung aturan hukum internasional dan perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Namun, beberapa negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok, menunjukkan ketidaksetujuan terhadap campur tangan pengadilan internasional dalam sengketa bilateral.
4. Kontroversi dan Tantangan Pelaksanaan; Kontroversi muncul terkait implementasi keputusan arbitrase. Meskipun Filipina meenangkan kasusnya, implementasi keputusan tersebut menghadapi sejumlah tantangan. Tiongkok menolak untuk mengakui yurisdiksi pengadilan dan menyatakan bahwa itu tidak akan mematuhi keputusan tersebut. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan menghadirkan pertanyaan tentang efektivitas keputusan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa di mana salah satu pihak tidak bersedia bekerja sama.
5. Kontroversi di Indonesia; Indonesia, sebagai negara anggota ASEAN yang memiliki perhatian terhadap stabilitas regional, secara resmi menyatakan bahwa keputusan arbitrase tersebut harus dihormati dan diterapkan. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam klaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan, Indonesia sebagai pemain regional memiliki kepentingan untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik.

3.4 Diplomasi Pasca-Arbitrase

Keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen pada 12 Juli 2016, yang memihak Filipina dalam klaimnya terhadap Tiongkok terkait Sengketa Laut Tiongkok Selatan, menyulut reaksi mendalam dari pemerintah Tiongkok. Reaksi ini mencerminkan ketidakpuasan, penolakan terhadap yurisdiksi pengadilan, dan penekanan pada pendekatan bilateral dalam menangani sengketa wilayah. Respon pemerintah Tiongkok menciptakan gelombang kontroversi di tingkat regional dan internasional.

Pada awalnya, Tiongkok menolak untuk mengakui yurisdiksi Pengadilan Arbitrase Permanen dan menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui atau mematuhi keputusan arbitrase tersebut.

Penolakan ini mencerminkan sikap Tiongkok yang keras terhadap campur tangan pihak ketiga dalam isu-isu teritorial dan menekankan pendekatan bilateral dalam menyelesaikan

konflik. Pemerintah Tiongkok, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, secara konsisten menegaskan bahwa sengketa wilayah, termasuk klaim di Laut Tiongkok Selatan, seharusnya diselesaikan melalui dialog langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Tiongkok menekankan pentingnya diplomasi dan negosiasi sebagai cara yang lebih efektif dan konsisten dengan prinsip-prinsip hubungan internasional.

Selain itu, Tiongkok menanggapi dukungan internasional terhadap keputusan arbitrase dengan skeptis. Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa beberapa negara mendukung Filipina karena kepentingan geopolitik tertentu dan menilai bahwa dukungan tersebut tidak memperhitungkan realitas dan hukum internasional. Respon Tiongkok juga mencakup tindakan nyata di lapangan. Pemerintah Tiongkok meningkatkan aktivitas militer dan pembangunan fasilitas di pulau-pulau buatan di Laut Tiongkok Selatan, yang menjadi sumber konflik. Langkah-langkah ini menciptakan ketegangan tambahan dan meningkatkan kompleksitas situasi di kawasan tersebut.

Respon pemerintah Tiongkok terhadap keputusan arbitrase menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan ketegangan dalam dinamika geopolitik regional. Meskipun beberapa negara mendukung keputusan arbitrase tersebut, termasuk dukungan dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, pemerintah Tiongkok tetap teguh dalam sikapnya untuk menolak keputusan tersebut⁷.

Inisiatif diplomasi Filipina dalam menangani Sengketa Laut Tiongkok Selatan menjadi cermin dari komitmen pemerintah Filipina untuk mencari penyelesaian damai melalui berbagai pendekatan. Inisiatif tersebut, terutama dalam konteks klaim teritorial dan maritim Filipina yang berselisih dengan Tiongkok, telah melibatkan langkah-langkah strategis yang mencakup upaya hukum, diplomasi internasional, serta kerjasama regional. Dalam analisis ini, kita akan menjelajahi langkah-langkah yang diambil Filipina dan dampaknya dalam membangun perdamaian di kawasan. Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh Filipina adalah pengajuan klaimnya ke Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2013. Keputusan untuk menggunakan jalur hukum ini mencerminkan upaya Filipina untuk menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Klaim ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional⁸.

Filipina juga telah secara aktif mencari dukungan internasional dalam upayanya menyelesaikan sengketa tersebut. Upaya diplomasi ini melibatkan penggalangan dukungan dari negara-negara mitra, terutama dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Dukungan internasional memberikan legitimasi pada klaim Filipina dan sekaligus menciptakan tekanan diplomatik pada pihak Tiongkok. Dalam konteks regional, Filipina terlibat dalam dialog bilateral dan multilateral dengan negara-negara tetangga yang terlibat dalam sengketa wilayah tersebut. Melalui ASEAN, Filipina berpartisipasi dalam negosiasi dan konsultasi untuk mencapai pendekatan bersama terhadap sengketa tersebut. ASEAN menjadi platform penting dalam merumuskan strategi regional untuk menangani isu-isu kompleks yang terkait dengan Laut Tiongkok Selatan. Pemerintah Filipina juga mengambil langkah untuk memperkuat kerjasama regional dengan negara-negara di sekitarnya. Kerjasama bilateral dengan Vietnam, Malaysia, dan Indonesia menjadi bagian dari strategi diplomasi Filipina untuk membangun solidaritas regional. Upaya ini menciptakan fondasi kerjasama yang lebih kuat dalam menangani sengketa dan menjaga stabilitas di kawasan.

⁷ Arbitration, S. C. S. (2016). Document Reprint Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the. *Chinese Journal of International Law*, 431, 455.

⁸ Talmon, S. (2022). Beyond the South China Sea Arbitration. In *The South China Sea Arbitration* (pp. 334-378). Brill Nijhoff.

Diplomasi manusia juga menjadi alat yang dimanfaatkan Filipina untuk mencapai tujuan damai. Orang-orang Filipina yang bekerja di luar negeri, terutama di negara-negara yang terlibat dalam sengketa, menjadi agen diplomasi informal yang membantu membangun pemahaman lintas-budaya dan menjalin hubungan positif antara negara-negara terlibat.

Selain itu, Filipina secara aktif memperkuat kampanye kesadaran internasional mengenai isu-isu yang berkaitan dengan sengketa tersebut. Partisipasi dalam konferensi internasional, seminar, dan forum internasional menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat dunia tentang implikasi sengketa ini terhadap perdamaian dan keamanan regional.

3.5 Kesepekatan dan Negosiasi

Proses negosiasi antara Tiongkok dan Filipina terkait Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan sebuah perjalanan panjang yang melibatkan berbagai aspek diplomasi. Sebagai dua negara tetangga yang memiliki sejarah hubungan yang kompleks, upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat teritorial dan maritim memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif. Negosiasi dimulai dengan dialog diplomatik intensif antara kedua pihak. Pertemuan tingkat tinggi menjadi langkah awal untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, dan harapan masing-masing negara. Dialog ini menciptakan dasar untuk membahas isu-isu yang bersifat sensitif, seperti klaim teritorial di Laut Tiongkok Selatan.

Pertemuan bilateral secara berkala menjadi ruang bagi Tiongkok dan Filipina untuk membahas secara langsung perbedaan mereka. Diskusi melibatkan berbagai aspek, mulai dari klaim teritorial hingga hak navigasi dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan tersebut. Meskipun terdapat perbedaan pandangan yang signifikan, pertemuan ini memberikan peluang bagi kedua belah pihak untuk saling memahami dan mencari titik temu.

Peran mediasi dari pihak ketiga, seperti ASEAN, juga menjadi bagian dari proses negosiasi. Meskipun sengketa ini bersifat bilateral, mediasi dari organisasi regional dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan ruang untuk dialog yang lebih terbuka. ASEAN menyediakan forum yang memungkinkan kedua belah pihak untuk berbicara dan mendengarkan pandangan negara-negara anggota lainnya.

Pilihan Filipina untuk membawa sengketa ke Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2013 menjadi langkah signifikan dalam upaya mencari solusi hukum. Meskipun Tiongkok menolak untuk mengakui yurisdiksi arbitrase, langkah ini menciptakan tekanan hukum dan diplomatis yang signifikan. Proses arbitrase internasional membawa isu sengketa ke panggung global dan mencari keputusan yang dapat diakui secara luas. Selama perjalanan negosiasi, Tiongkok dan Filipina akhirnya mencapai kesepakatan kerja sama bilateral untuk mengelola sumber daya di Laut Tiongkok Selatan. Kesepakatan ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan lingkungan, penanggulangan bencana, dan pemanfaatan bersama sumber daya alam. Meskipun kesepakatan ini tidak menyelesaikan seluruh kompleksitas sengketa, ia menciptakan fondasi untuk kerja sama lebih lanjut di masa depan.

Kesepakatan bersama antara Tiongkok dan Filipina dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya di wilayah Laut Tiongkok Selatan mencerminkan langkah positif menuju kerja sama yang saling menguntungkan di tengah sengketa wilayah yang kompleks. Kesepakatan ini, yang melibatkan berbagai aspek termasuk perlindungan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, dan penanggulangan bencana, menandai upaya kedua negara untuk menemukan solusi damai yang dapat membawa manfaat bagi keduanya.

Proses pembangunan kesepakatan dimulai dengan dialog intensif antara Tiongkok dan Filipina. Pertemuan tingkat tinggi dan pertemuan bilateral menjadi wadah untuk membahas masalah-masalah yang memerlukan kesepakatan bersama. Perbincangan melibatkan

berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah, ahli lingkungan, dan pakar sumber daya alam, untuk memastikan sudut pandang yang komprehensif. Dalam kerangka kesepakatan ini, kedua negara sepakat untuk bersama-sama mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Laut Tiongkok Selatan. Langkah-langkah konkret diambil untuk merancang rencana pembangunan yang berkelanjutan, memastikan bahwa eksploitasi sumber daya dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekosistem laut.

Perlindungan lingkungan laut menjadi fokus utama dalam kesepakatan ini. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga ekosistem laut yang rentan dan memastikan bahwa aktivitas manusia tidak merugikan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Langkah-langkah konkret, seperti pengawasan terhadap limbah industri dan peningkatan pemahaman terhadap dampak lingkungan, diintegrasikan ke dalam kesepakatan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan laut. Pemanfaatan sumber daya alam di Laut Tiongkok Selatan juga diatur dengan cermat. Kedua negara sepakat untuk menghindari praktik-praktik eksploitatif yang dapat merugikan keberlanjutan sumber daya. Mekanisme pengawasan dan pemantauan diterapkan untuk memastikan bahwa aktivitas ekstraktif dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan hak-hak nelayan tradisional.

Dalam konteks penanggulangan bencana, kesepakatan bersama mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana alam. Negara-negara tersebut sepakat untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya untuk membantu melindungi masyarakat dan lingkungan dari potensi bencana seperti gempa bumi, tsunami, atau badai. Kesepakatan bersama dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya di wilayah Laut Tiongkok Selatan menciptakan landasan kerja sama yang saling menguntungkan antara Tiongkok dan Filipina. Dengan memasukkan aspek-aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, kesepakatan ini diharapkan dapat membawa manfaat positif bagi kedua negara dan meredakan ketegangan terkait sengketa wilayah.

3.6 Implikasi Global dan Pembelajaran

Penyelesaian sengketa, khususnya antara Tiongkok dan Filipina terkait Laut Tiongkok Selatan, berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas regional di Asia Tenggara. Stabilitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan politik hingga keseimbangan ekonomi di kawasan. Dalam analisis ini, penulis mengidentifikasi dampak penyelesaian sengketa tersebut terhadap stabilitas regional dan merinci aspek-aspek kunci yang perlu diperhatikan, yaitu:⁹

1. Pengurangan Ketegangan: Penyelesaian sengketa antara Tiongkok dan Filipina dapat mengurangi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Dengan mencapai kesepakatan atau keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, risiko konflik militer dapat berkurang. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil di kawasan, memungkinkan negara-negara untuk fokus pada pembangunan ekonomi dan kerja sama regional.
2. Peningkatan Kepercayaan: Proses penyelesaian sengketa yang transparan dan adil dapat membantu membangun kepercayaan antara negara-negara di kawasan. Kepercayaan ini merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas regional, karena negara-negara akan merasa lebih nyaman untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam berbagai bidang. Peningkatan kepercayaan juga dapat merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan.

⁹ Talmon, S. (2022). Beyond the South China Sea Arbitration. In *The South China Sea Arbitration* (pp. 334-378). Brill Nijhoff.

3. Penguatan Kerja Sama Regional: Penyelesaian sengketa dapat membuka jalan bagi penguatan kerja sama regional. Dengan mengatasi ketidakpastian terkait sengketa wilayah, negara-negara di Asia Tenggara dapat lebih mudah untuk merancang dan melaksanakan program-program kerja sama regional. Ini dapat mencakup bidang keamanan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur yang membantu menciptakan stabilitas jangka panjang.
4. Pertumbuhan Ekonomi Regional: Stabilitas politik dan keamanan menjadi faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Penyelesaian sengketa dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk investasi dan perdagangan. Dengan mengurangi ketidakpastian terkait sengketa, negara-negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien untuk pembangunan ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.
5. Penguatan Diplomasi Regional: Penyelesaian sengketa memberikan peluang untuk memperkuat diplomasi regional. Negara-negara di Asia Tenggara dapat bekerja sama dalam mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Melalui dialog dan negosiasi, mereka dapat membangun fondasi untuk mengatasi sengketa lainnya dan menciptakan mekanisme regional yang lebih efektif.

Penyelesaian sengketa internasional antara Tiongkok dan Filipina terkait Laut Tiongkok Selatan Kasus ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang seringkali dihadapi oleh negara-negara dalam menyelesaikan perbedaan pendapat teritorial dan maritim. Berikut adalah sejumlah pelajaran yang dapat diambil. Dalam konteks diplomasi internasional, penyelesaian damai melalui dialog terus menjadi pendekatan yang efektif. Kesepakatan yang dicapai antara Tiongkok dan Filipina menunjukkan bahwa ketika negara-negara bersedia berbicara dan bernegosiasi, peluang untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak menjadi lebih besar. Oleh karena itu, diplomasi tetap menjadi alat utama dalam menangani sengketa internasional.

Penggunaan pengadilan internasional, seperti Pengadilan Arbitrase Permanen, memberikan landasan hukum yang kuat untuk penyelesaian sengketa. Keputusan arbitrase dapat memainkan peran kunci dalam menegakkan aturan hukum internasional dan menciptakan tekanan diplomatik pada pihak yang mungkin enggan mengikuti proses penyelesaian.

Pentingnya kerja sama regional tergambar dalam peran ASEAN dalam memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Organisasi regional dapat berperan sebagai mediator dan penyedia forum untuk mencapai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan dapat belajar untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi melalui organisasi regional guna mencapai penyelesaian sengketa yang berkelanjutan.

Transparansi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa dapat membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa dan masyarakat internasional. Keseluruhan proses, termasuk pertemuan tingkat tinggi dan mediasi, harus dapat diakses dan dipahami oleh pihak yang terlibat dan masyarakat global. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan memastikan bahwa hasil penyelesaian dapat diterima secara luas.

Kesadaran internasional tentang sengketa dan isu-isu terkait dapat menjadi kekuatan positif. Kampanye kesadaran internasional dapat membantu memobilisasi dukungan global, mendorong perhatian dunia terhadap isu-isu tersebut, dan menciptakan tekanan diplomatik pada pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa

internasional dapat belajar untuk menggunakan opini publik global sebagai faktor yang dapat memengaruhi proses penyelesaian.

Penyelesaian sengketa yang mencakup perlindungan lingkungan dan keberlanjutan dapat memperkuat kesepakatan secara keseluruhan. Kesadaran akan dampak lingkungan dan keberlanjutan menjadi semakin penting dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam. Kesepakatan yang mempertimbangkan aspek-aspek ini dapat membawa manfaat jangka panjang bagi kedua belah pihak.

Dengan merinci pelajaran-pelajaran ini, penanganan sengketa internasional dapat ditingkatkan. Terutama, pemahaman akan pentingnya diplomasi, hukum internasional, kerja sama regional, transparansi, kesadaran internasional, dan keberlanjutan dapat membantu negara-negara dalam mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengambil pelajaran dari pengalaman penyelesaian sengketa antara Tiongkok dan Filipina, negara-negara dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk menangani sengketa internasional di masa depan.

4. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa internasional antara Tiongkok dan Filipina terkait Laut Tiongkok Selatan membawa sejumlah kesimpulan berharga yang dapat dijadikan pedoman dalam menangani sengketa serupa di masa depan. Kasus ini menawarkan wawasan tentang kompleksitas, dinamika, dan potensi solusi yang dapat diterapkan untuk mencapai perdamaian dan stabilitas regional. Diplomasi tetap menjadi landasan utama dalam menyelesaikan sengketa internasional. Kesepakatan antara Tiongkok dan Filipina menunjukkan bahwa dialog terus mampu membawa solusi, meskipun dalam sengketa yang melibatkan klaim teritorial dan sumber daya laut yang sensitif. Negosiasi menjadi alat utama yang efektif dalam mengatasi perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Pentingnya pengadilan internasional, seperti Pengadilan Arbitrase Permanen, menguatkan kerangka hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa. Keputusan arbitrase memberikan landasan hukum yang kuat dan memberikan instrumen untuk menegakkan aturan hukum internasional. Pemanfaatan lembaga-lembaga hukum internasional dapat menjadi aspek yang krusial dalam proses penyelesaian sengketa yang adil dan objektif. Kerja sama regional, terutama melalui organisasi seperti ASEAN, memainkan peran signifikan dalam memfasilitasi dialog dan meredakan ketegangan. Penyelesaian sengketa tidak hanya menjadi tanggung jawab bilateral antarnegara, tetapi juga memerlukan dukungan dan koordinasi regional. Pelibatan organisasi regional dapat membantu membangun fondasi untuk kerja sama yang lebih luas dan berkelanjutan. Transparansi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa memiliki dampak positif terhadap kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa dan masyarakat internasional. Kesadaran akan proses dan keputusan yang diambil memastikan bahwa penyelesaian sengketa dapat diterima secara luas. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi prinsip yang dijunjung tinggi dalam setiap langkah penanganan sengketa internasional.

Kesadaran internasional terhadap sengketa dan isu-isu terkait menjadi kekuatan yang dapat memengaruhi proses penyelesaian. Kampanye kesadaran internasional dapat memobilisasi dukungan global, membawa isu-isu tersebut ke panggung dunia, dan menciptakan tekanan diplomatik pada pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa internasional dapat belajar untuk menggunakan opini publik global sebagai faktor yang dapat memengaruhi arah penyelesaian.

Penyelesaian sengketa yang mencakup perlindungan lingkungan dan keberlanjutan memberikan dimensi tambahan yang sangat penting. Kesadaran akan dampak lingkungan dan keberlanjutan menjadi semakin krusial dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam. Kesepakatan yang mencerminkan kepedulian terhadap ekosistem dan keberlanjutan dapat membawa manfaat jangka panjang dan menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai kesimpulan, pengalaman penyelesaian sengketa antara Tiongkok dan Filipina menyajikan sejumlah pelajaran berharga yang dapat dijadikan panduan untuk penanganan sengketa internasional di masa depan. Diplomasi, hukum internasional, kerja sama regional, transparansi, kesadaran internasional, dan keberlanjutan menjadi elemen-elemen kunci yang harus diperhatikan dalam rangka mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengaplikasikan pelajaran ini, negara-negara dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menangani perbedaan pendapat internasional dengan cara yang konstruktif dan damai.

Referensi

- Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics*. WW Norton & Company
- Brown, S. E., & Ainley, K. (Eds.). (2009). *Understanding International Relations*. Oxford University Press
- Galtung, J. (1996). Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization. *Peace by Peaceful Means*, 1-292.
- Warka, M., Kleden, K. L., Afifah, W., Sugianto, F., Parihar, S. M., Faga, H. P., ... & Indrayati, I. R. *Mimbar Keadilan* Volume 16 Nomor 1 Februari 2023.
- .Wibowo, I., & Hadi, S. (2013). *Merangkul Cina*. Gramedia Pustaka Utama
- Cogliati-Bantz, V. P. (2016). The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China). *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 31(4), 759-774.
- Arbitration, S. C. S. (2016). Document Reprint Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the. *Chinese Journal of International Law*, 431, 455
- Talmon, S. (2022). Beyond the South China Sea Arbitration. In *The South China Sea Arbitration* (pp. 334-378). Brill Nijhoff.
- Talmon, S. (2022). Beyond the South China Sea Arbitration. In *The South China Sea Arbitration* (pp. 334-378). Brill Nijhoff.